BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon merupakan inovasi teknologi yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas layanan administrasi wakaf secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak implementasi SIWAK, proses administrasi wakaf menjadi lebih terorganisir, transparan, dan efisien, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun akurasi data untuk mengurangi konflik persengketaan tanah. Aplikasi ini memungkinkan petugas KUA untuk mengakses dan memperbarui informasi wakaf secara real-time, menyimpan data *wakif* dan *nazir* secara rapi, serta memudahkan pelacakan dokumen wakaf yang sebelumnya sulit diakses jika masih dalam bentuk arsip manual. SIWAK juga memungkinkan penyusunan laporan wakaf secara lebih sistematis dan mendukung proses digitalisasi layanan yang sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi.
2. Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, seperti *wakif* dan *nazir* dari berbagai masjid, mushola, hingga madrasah di wilayah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf bukan hanya berasal dari pihak KUA saja, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain dari kedua belah pihak, baik internal maupun eksternal, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada *wakif* dan *nazir*, jampir seluruh informan yang diwawancarai mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai proses sertifikasi tanah wakaf, serta minim pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, khususnya mengenai peran dan

kewajiban *wakif* dan *nazir* dalam proses administrasi wakaf, keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi dan aplikasi SIWAK, sangat disayangkan, sebagian besar *wakif* dan *nazir* tidak mengetahui adanya aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai sarana digitalisasi administrasi wakaf. Hal ini menunjukkan kurangnya penyuluhan teknologi serta belum optimalnya penerapan sistem digital dalam proses pelayanan publik di bidang wakaf, keterbatasan waktu dan kesiapan administratif, banyak *wakif* dan *nazir* yang merasa kesulitan meluangkan waktu untuk mengurus proses sertifikasi karena kesibukan pribadi maupun kurangnya pemahaman prosedural beberapa dari mereka bahkan belum memiliki dokumen pendukung yang lengkap, seperti surat hibah atau surat tanah yang jelas status hukumnya, rendahnya SDM dan infrastruktur di KUA, petugas KUA juga menghadapi tantangan internal, seperti rendahnya jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang perwakafan, serta fasilitas yang belum memadai untuk menjalankan digitalisasi secara optimal, Hal ini berdampak pada lambatnya pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat dalam proses sertifikasi, ketergantungan terhadap praktik tradisional masih banyak masyarakat yang menggunakan pendekatan tradisional dalam pengelolaan tanah wakaf tanpa dokumentasi resmi, sehingga menyulitkan proses legalisasi, ketidaksiapan terhadap perubahan menuju sistem digital juga menjadi faktor penghambat.

B. Saran

1. Penguatan pelatihan dan kapasitas SDM KUA, dianjurkan agar Kementerian Agama, khususnya pada tingkat daerah, secara berkala menyelenggarakan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para petugas KUA dalam pengoperasian aplikasi SIWAK. Meskipun sistem ini telah terbukti efektif, namun masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam agar penggunaannya bisa lebih maksimal dan kesalahan teknis dapat diminimalisir. Pelatihan juga perlu menyentuh aspek pembaruan sistem jika terdapat fitur baru dari pusat.
2. Optimalisasi infrastruktur pendukung, disarankan agar KUA Kecamatan Pekalipan terus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, serta sistem cadangan data (*backup*) yang aman. Infrastruktur yang kuat akan mendukung kelancaran operasional aplikasi SIWAK serta mencegah hambatan teknis yang dapat memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
3. Sosialisasi kepada masyarakat dan *Nazir*, pemerintah daerah dan KUA sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama para *wakif* dan *Nazir*, mengenai pentingnya wakaf yang tercatat secara resmi melalui sistem SIWAK. Edukasi ini penting agar mereka memahami proses penerbitan AIW/APAIW secara digital dan termotivasi untuk melakukan pendaftaran wakaf melalui jalur resmi yang legal dan terdokumentasi dengan baik.